



Judul : Pansus RUU Ibukota Tabrak Aturan
Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pansus RUU Ibu Kota Tabrak Aturan

KEPUTUSAN DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan jumlah total 59 anggota menabrak Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Ketentuan itu membatasi jumlah anggota pansus hanya 30 orang.

Direktur Nara Integritas Ibrahim Fahmi Badoh menilai DPR telah mempertaruhkan integritas. "Pembentukan pansus dan perubahan tatib bertentangan dengan target DPR membangun lembaga berintegritas. DPR tergoda dengan energi yang kuat sehingga melakukan itu," ujar Ibrahim pada webinar bertajuk Demi Ibu Kota Negara Rusak Sistem Negara, kemarin.

Ia mengatakan DPR harus diingatkan terus mengenai integritas. Pembentukan pansus itu terbukti melanggar tatib dan kode etik DPR.

"Tidak hanya itu. Jika melihat syarat formil, kejadian ini juga melanggar UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sekarang mereka malu dan ingin dibatalkan dengan kembali jumlah pansus 30 orang, tapi tidak bisa menyelesaikan syarat formil yang kadung diterabas," paparnya.

Menurut Ibrahim, DPR harus mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Wakil rakyat tidak boleh sering melanggar aturan yang dibuat sendiri.

"Praktik ini harus menjadi pembelajaran dengan meminta MKD (Majelis Kehormatan Dewan) untuk mengusut pelanggaran etik dari peristiwa ini," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengapresiasi keinginan DPR mempercepat pembahasan RUU IKN. Sayangnya DPR sembrono. "Semangat mereka luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan ketaatan terhadap aturan yang mereka buat sendiri," cetusnya.

Di kesempatan terpisah, anggota Pansus IKN dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menyoal waktu pemin-dahan IKN yang dimulai pada semester I 2024. Hal itu tertuang dalam draf RUU IKN.

Hamid mengatakan eksekusi pemindahan terke-sa tergesa-gesa karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia sedang tidak menentu akibat pandemi covid-19. Kesan tergesa-gesa dikuatkan dengan proses pembahasan di DPR yang lebih cepat da-ripada biasanya. Fraksi diminta mengirim daftar inventarisasi masalah (DIM) hanya dua hari setelah mendapat input dari para ahli dan pakar.

"Kita mengajak masyarakat untuk turut meng-awasi proses pembahasan RUU IKN ini," tandas Hamid. (Cah/Sru/P-2)